



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia terakhir kali menyelenggarakan Pemilihan Umum atau Pemilu pada 17 April tahun 2019 lalu. Pemilu tersebut menjadi eksperimen terbesar dalam sejarah penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia, karena untuk pertama kali pelaksanaannya mencakup pemilihan pejabat legislatif, yakni anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD); sekaligus pejabat eksekutif, yakni Presiden dan Wakil Presiden serentak dalam satu waktu (Fachrudin, 2019, p. 119).

Model baru pelaksanaan Pemilu tersebut diatur dalam Undang-undang (UU) Pemilu yang baru, yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatukan dan menyederhanakan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; serta UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan DPR, DPRD, dan DPD dalam satu aturan.

Pemadatan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) lantas membuat pelaksanaan Pemilu menjadi kompleks dan menimbulkan berbagai masalah (Fachrudin, 2019, p. 119). Salah satunya, yakni Pemilu yang dilakukan serentak tidak terbukti dapat mengurangi konflik vertikal dan horizontal di masyarakat. Sebaliknya, di dalam Pemilu serentak 2019 justru

terjadi polarisasi politik identitas yang sedemikian tajam. Polarisasi tersebut banyak terwujud dalam perang komunikasi verbal instrumen digital dan media sosial, misalnya lewat kemunculan istilah kecebong dan kampret, atau menyebarnya penggunaan tagar #JokowiWinElction, #VictoryForPrabowo, #2019GantiPresiden, dan #DiaSibukKerja (Fachrudin, 2019, pp. 130-131).

Riset evaluasi Pemilu serentak 2019 yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 27 April hingga 5 Mei tahun 2019 telah membuktikan adanya polarisasi politik identitas di Indonesia. Riset berbentuk survei tersebut melibatkan 1500 responden masyarakat yang tersebar di 34 provinsi dengan menggunakan metode *multistage random sampling*, *margin of error* sebesar 2,53% serta tingkat kepercayaan 95%. Salah satu bagian hasil survei LIPI mengatakan bahwa 41% responden menyatakan keberatan dalam memilih calon legislatif (caleg) yang memiliki perbedaan agama. Selain itu, sebanyak 80,7% responden menjawab bahwa latar belakang agama caleg menjadi pertimbangan dalam memilih. Sedangkan jumlah responden yang mempertimbangkan latar belakang etnis caleg mencapai 73,9% (Fachrudin, 2019, pp. 125-127).

Polarisasi politik identitas yang merusak Pemilu serentak tahun 2019 telah terbentuk sejak Pilpres tahun 2014 sampai Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tahun 2017. Terdapat pembagian antara dua kubu pemilih yang saling berseberangan dan tidak pernah memiliki titik temu, yakni kelompok moderat dan konservatif. Kelompok moderat mengarahkan dukungannya pada sosok Joko Widodo dan Basuki Tjahjapurnama atau Ahok, sedangkan kelompok

konservatif menjadi pendukung tokoh seperti Prabowo Subianto dan Anies Baswedan (Karim, 2019, p. 217). Polarisasi terbentuk lantaran masyarakat melihat para pemimpin hadir sebagai pemain-pemain yang berseberangan dalam segala hal, tidak terkecuali perihal tema kampanye yang dibawa (Sumampouw, 2018, dalam Karim, 2019, p. 217-218). Satu pemimpin membicarakan tentang penguatan kawasan pinggiran, sedangkan pemimpin lainnya terlihat berbicara tentang mengembalikan kejayaan Indonesia (Lim, 2017, dalam Karim, 2019, p. 218).

Salah satu konflik yang dipicu oleh polarisasi adalah unjuk rasa yang dilakukan oleh massa pendukung pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno, pada 21 Mei 2019. Unjuk rasa dilangsungkan untuk menolak kemenangan pasangan nomor urut 01 yakni Joko Widodo dan Ma'aruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019 hingga 2024. Massa unjuk rasa sepakat menganggap hasil pemilu tidak sah, karena diduga terdapat kecurangan atau sengketa dalam proses pemilihan suara di sejumlah daerah. Mengutip laman Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan nomor urut 01 memperoleh 84.654.894 suara (55,32%), sedangkan pasangan nomor urut 02 hanya memperoleh 68.359.086 suara (44,68%).

Unjuk rasa damai ini tanpa diduga kemudian berubah menjadi kerusuhan. Menyadur dari laman Pantau.com, peristiwa kerusuhan terjadi di sejumlah titik di DKI Jakarta, antara lain di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tanah Abang, Asrama Brimob Petamburan, hingga *flyover* slipi (Albaki, 2019, para. 05).

Massa unjuk rasa mulanya sempat telah membubarkan diri pada pukul 21.00 WIB. Namun pada pukul 23.00, massa tambahan datang dari arah jalan Sabang dan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, dengan cara yang anarkis dan provokatif. Kehadiran massa yang tidak diundang tersebut memicu kerusuhan antara massa dengan aparat, yang diwarnai dengan aksi lempar melempar batu, bambu, petasan, dan molotov antara polisi dengan massa. Pengrusakan fasilitas umum dan harta pribadi berlangsung dari larut malam 21 Mei 2019 hingga dini hari 22 Mei 2019 (Bayu, 2019, para. 05-10).

Kerusuhan mengakibatkan delapan orang tewas, 730 sipil terluka, serta 14 anggota kepolisian terluka. Ada pun dampak lain adalah 25 kendaraan roda empat rusak di Petamburan; 14 di antaranya milik polisi. Di Slipi Jaya, lima bus dan dua kendaraan roda empat milik polisi dibakar. Kerugian mencapai lebih dari Rp200 miliar dialami oleh pasar Tanah Abang. Sedangkan kerugian di bidang perniagaan mencapai Rp1-5 triliun (Albaki, 2019, para. 05).

Tersangka konflik berasal dari tiga kelompok penunggang kerusuhan, antara lain kelompok anggota Gerakan Reformis Islam (GARIS) yang terafiliasi dengan teroris ISIS, kelompok penyelundup senjata ilegal dari Aceh yang melibatkan Komandan Jendral Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayor Jendral TNI Purnawirawan Soenarko, dan juga kelompok perencana pembunuhan terhadap empat tokoh nasional yang dikomandai oleh Mayor Jendral Purnawirawan Kivlan Zen.

Konflik, menurut Fisher & Dekka, dkk (2010), merupakan kondisi dimana adanya dua kelompok yang memiliki perbedaan satu sama lain dalam hal pikiran, perasaan, tindakan dalam rangka mencapai tujuan yang sama. Dalam teori kebutuhan, konflik disebabkan oleh benturan kepentingan dalam memperjuangkan pemenuhan kebutuhan dasar, baik fisik, mental maupun sosial (Sukardi, 2016, p. 78 & 81).

Konflik selalu menarik perhatian media. Media melihat bahwa konflik penuh dengan *news value* (nilai berita), karena di dalamnya terhadap pro dan kontra (Rusdi, 2012, p. 388), serta selalu menimbulkan korban (Ishwara, 2001, dalam Sunarni, 2014, p. 175). Media dan konflik juga terikat dalam harmoni kepentingan. Media membutuhkan laporan dengan daya tarik khalayak yang tinggi, sementara pihak lainnya memerlukan konstruksi dari pemberitaan media agar konflik yang dipicunya punya *magnitude* besar. Dengan demikian, media memiliki posisi penting di dalam sebuah konflik. (Mubarok, 2012, p. 186).

Media selalu melakukan seleksi terhadap konten yang dikabarkannya. Pemilihan konten apa yang ingin disajikan tidak terlepas dari misi, visi, nilai, atau ideologinya (Sunarni, 2014, p. 175). Hal tersebut berlaku pula dalam peliputan konflik. Perilaku selektif media dalam peliputan konflik sangat menentukan wajah konflik yang akan dipahami oleh masyarakat. Bagaimana masyarakat akan memaknai konflik yang sedang terjadi akan bergantung pada sudut pandang yang bekerja di dalam pemberitaan media (Mubarok, 2012, p. 186). Koordinator *Peace and Conflict Journalism Network* (Pecojon)

Internasional, Antonio Koop, mengatakan bahwa teknik pelaporan konflik yang diterapkan media juga turut menentukan bagaimana kedua pihak yang berkonflik saling memberikan persepsi satu sama lain (Sunarni, 2014, p. 177).

Terdapat dua kemungkinan efek yang dihasilkan dari konstruksi realitas yang dihadirkan media: meredam konflik atau mempertajam konflik (Sunarni, 2014, p. 175). Namun, sebagai sebuah organisasi bisnis, konstruksi realitas konten media rentan dimenangkan oleh kepentingan pragmatis yang datang dari pemilik media dengan tujuan politik dan ekonomisnya (Mubarok, 2012, p. 184). Kepentingan pragmatis tersebut berpotensi membuat peliputan konflik di media memberikan efek yang kedua, dimana laporan pemberitaan berpotensi membuat konflik menjadi lebih panjang alih-alih mendorong penyelesaian. Pertarungan kepentingan ekonomis, ideologis, dan politis yang bermain di dalam media seringkali mendorong pekerja media untuk menomorduakan kontrol profesinya, sehingga menghasilkan laporan konflik yang bias, tidak berimbang, dan tidak adil (Sunarni, 2014, p. 176).

Misalnya, jurnalis menentukan judul dan membuat isi berita yang provokatif dan berpotensi menimbulkan pemaknaan negatif terhadap kelompok tertentu, atau melakukan justifikasi dengan cara menghukum satu pihak di dalam konflik tanpa melalui proses verifikasi atau konfirmasi dengan narasumber yang terjamin kredibilitasnya. Pekerja media juga seringkali melakukan kesalahan ketika memilih narasumber. Misalnya, jurnalis hanya fokus menggali fakta dari kelompok elit, sehingga pemberitaan didominasi oleh narasi pejabat, polisi, kalangan birokrat yang sesungguhnya tidak terlibat

dalam konflik (Sunarni, 2014, p. 176). Pemberitaan yang dihasilkan pun cenderung membingkai peristiwa konflik sebagai kompetensi antara dua kelompok. Masyarakat seolah diajak untuk memaknai konflik layaknya adegan sinetron atau film laga. (Mubarok, 2012, pp. 186-187).

Kegagalan media dalam memberitakan konflik dengan cara yang tepat juga tidak terlepas dari faktor rutinitas internal media yang ada di belakangnya. Media diandaikan sebagai sebuah pabrik; memiliki standar atau aturan main yang diterapkan pada para pekerjanya agar menghasilkan produk yang sejalan dengan kepentingan perusahaan. Kecenderungan tersebut bisa diidentifikasi lewat keberadaan rapat redaksi yang memungkinkan *editor* atau koordinator liputan untuk mengontrol bagaimana berita itu diambil, ditulis, dan disunting (Rusdi, 2012, pp. 389-392).

Bagi peliputan kasus konflik, rutinitas media seperti menimbulkan dua dampak yang berlawanan. Di satu sisi, rutinitas media menekan pengaruh individu terhadap pembentukan isi media. Pengaruh individu terwujud dalam bentuk latar belakang nilai, pengalaman dan pendidikan individu jurnalis yang dipercaya dapat menentukan penggambaran suatu peristiwa dalam teks media. Misalnya, kesamaan latar belakang etnis atau preferensi politik individu jurnalis dengan salah satu kelompok yang terlibat konflik, bisa mendorong terciptanya berita yang tidak seimbang, didasarkan atas prasangka yang sensitif, dan membahayakan pihak lain. Kebijakan dan batasan yang ditetapkan media bisa berguna untuk menekan kemungkinan terjadinya hal-hal tersebut (Mubarok, 2012, p. 393).

Ada pun di sisi lain, rutinitas media justru menurunkan kualitas peliputan jurnalis terhadap peristiwa konflik. Misalnya, karena prinsip media daring yang mengutamakan kecepatan, jurnalis dikenai tekanan *deadline* dan dituntut untuk cepat mengabarkan eksklusifitas. Akibatnya, metode peliputan tidak dilakukan secara hati-hati, dan jurnalis mungkin tidak menyadari bahwa laporan buaatannya berpotensi menghambat percepatan penyelesaian konflik, bahkan mengancam jiwa individu atau kelompok. Karena tuntutan tersebut reporter seringkali terlalu mengandalkan pengamatan terbatas di lapangan tanpa mempelajari latar belakang konflik. Berita pun menjadi fokus terhadap kekerasan (Rusdi, 2012, p. 388 & 394).

Menurut filsuf Peter L. Berger, proses konstruksi atas suatu peristiwa salah satunya bekerja melalui proses internalisasi, yaitu proses penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran individu yang subjektif. Dengan demikian, menurut Berger, realitas yang sama tetap memiliki wajah ganda atau plural. (Mubarok, 2012, p. 185). Begitu juga dalam peliputan konflik, setiap media juga akan menghasilkan kualitas pemberitaan yang berbeda-beda, bergantung pada perilakunya mengkonstruksi realitas peristiwa konflik, dan rutinitas internal yang diberlakukan kepada para pekerjanya.

Jurnalis dan media memiliki posisi strategis dalam menentukan ujung penyelesaian dari sebuah konflik. Karena itu, dalam peliputan konflik, jurnalis perlu memiliki kemampuan analisis resolusi konflik. Jurnalis harus mengasah kemampuan tersebut lewat pengalaman peliputan langsung di lapangan, sebagaimana yang selama ini dilakukan oleh ahli perdamaian. Jurnalis yang

menguasai kemampuan analisis resolusi konflik, memiliki keseimbangan antara kemampuan melaporkan peristiwa dengan kemampuan menawarkan penyelesaian konflik (McGoldrick & Lynch, 2006, p. 6).

Salah satu jurnal non-akademis dalam buku karya Agus Sudibyo dengan judul *Politik Media dan Pertarungan Wacana* (2001) pernah membuktikan bagaimana dua surat kabar terbesar di Indonesia, yakni Kompas dan Suara Pembaruan, menggunakan cara yang tidak profesional dalam memberitakan konflik penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon.

Baik Kompas dan Suara Pembaruan tidak hati-hati dalam melakukan pemilihan sumber berita. Kedua media tersebut memilih sumber hanya dari pihak pasukan Israel, sehingga pemberitaan terlalu menganut sudut pandang Israel dalam memaknai konflik. Pemberitaan milik media Suara Pembaruan membingkai secara positif bahwa pihak Israel adalah pemegang otoritas yang sah wilayah Timur Tengah. Demikian juga dengan pemberitaan milik media Kompas membingkai secara positif bahwa Israel telah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik atas nasib Tentara Lebanon Selasa (SLA) dan Hizbullah. Pemberitaan kedua media tersebut mengandung prasangka negatif terhadap pihak Lebanon, bahwa Suriah, Hizbullah, Iran dan Palestina adalah kelompok teroris yang anarkis dan destruktif (Sudibyo, 2001, pp. 149-158).

Untuk menekan kesalahan media dalam meliput konflik, diperlukan pendekatan khusus dalam peliputan peristiwa konflik yang perlu diaplikasikan dalam rutinitas internal organisasi media atau pun dalam diri

individu pekerja media. Johan Galtung pada tahun 1970 memperkenalkan pendekatan jurnalisme damai. Pada dasarnya jurnalisme damai bekerja dalam nilai-nilai anti kekerasan guna menciptakan konsep keseimbangan, keadilan dan akurasi dalam pelaporan peristiwa konflik. Jurnalisme damai dapat dikatakan sebagai peta baru untuk menelusuri hubungan antara jurnalis, sumber, cerita, dan kemungkinan dampak dari pemberitaan konflik. Jurnalisme damai memungkinkan jurnalis menganalisis tujuan dan agenda dari kedua pihak yang berkonflik untuk menawarkan bentuk penyelesaian (McGoldrick & Lynch, 2006, p. 05).

Praktik jurnalisme damai juga bertujuan mereduksi polarisasi dengan menggali secara lebih dalam setiap pihak yang terlibat konflik. Sederhananya, jurnalisme damai memperjelas wacana tentang apa yang sedang dibicarakan dan harus ditindaklanjuti dengan menyoroti perdamaian dan resolusi. Namun, ini bukan berarti jurnalisme damai sejalan dengan jurnalisme investigatif yang menggali kebenaran sebanyak apapun hanya dari satu pihak yang dicurigai. Dalam jurnalisme damai, kebenaran merupakan konsep yang berlaku bagi siapapun pihak yang berada dalam lingkaran konflik (Galtung, 2016, p. 179).

Menurut Nurudin (2006), jurnalisme damai sejalan dengan jurnalisme kemanusiaan, karena berfokus menempatkan manusia “sebagai manusia”. Prinsip jurnalisme kemanusiaan pun juga koheren dengan tujuan yang ingin dicapai dalam jurnalisme damai, di antaranya mengidentifikasi penyebab dan dampak konflik, memberikan solusi atas konflik, memberikan gambaran yang adil tentang setiap kelompok, dan memberikan ruang yang lebih luas bagi

narasi dari pihak-pihak eksternal yang peduli untuk mendorong perdamaian. Tidak seperti jurnalisme perang yang menciptakan distingsi tentang “siapa kawan dan siapa lawan”, jurnalisme damai berusaha untuk menyederhanakan kompleksitas hubungan antara banyak pemangku kepentingan di dalam konflik (Nurudin, 2006, pp. 9-11).

Jurnalisme damai juga sejalan dengan prinsip jurnalisme publik, yakni pendekatan jurnalisme yang memaksimalkan partisipasi komunitas masyarakat dalam penyampaian berita. Dalam jurnalisme publik, media memobilisasi sudut pandang masyarakat untuk memecahkan isu permasalahan. Partisipasi publik diwujudkan dalam bentuk penonjolan individu-individu sipil sebagai pemain utama dalam dialog pemberitaan (Lee, 2001, p. 92). Dalam konteks praktik jurnalisme damai, partisipasi publik bisa diwujudkan dalam bentuk inisiatif jurnalis untuk menggali informasi tentang apa yang dilakukan masyarakat selama bertahan di tengah konflik, daripada hanya menerangkan apa yang masyarakat rasakan atau pikirkan mengenai konflik (McGoldrick & Lynch, 2006, p. 31).

Lebih lanjut penelitian ini hendak menganalisis kualitas penerapan jurnalisme damai dalam pemberitaan peristiwa konflik kerusuhan 21-23 Mei milik media Kompas.id. Analisis dilakukan pada dua aspek, yakni teks pemberitaan dan juga di level rutinitas media.

Kerusuhan pascapemilu 21-23 Mei tahun 2019 ditetapkan sebagai fenomena empirik dari penelitian ini karena peristiwa tersebut merupakan konflik yang terjadi secara insidental dan terjadi dalam waktu yang singkat. Menurut Rusdi (2012), hal tersebut berpotensi melahirkan proses *gatekeeping* sederhana yang membuat peliputan beresiko mudah terjerumus dalam pendekatan jurnalisme perang. Resiko ini terutama terjadi pada media masa jaman sekarang yang mengutamakan persaingan dan mengedepankan pelaporan langsung di tempat kejadian (Rusdi, 2012, p. 393).

Kritik atas perilaku media dalam meliput kerusuhan pascapemilu 2019 juga sempat datang dari lembaga pusat kajian media Remotivi, dalam bentuk tayangan yang diunggah pada 14 Juni 2019 dengan judul “Apakah Pers Memperparah Konflik 22 Mei?”. Lewat tayangan tersebut, lembaga Remotivi mengkritik sebagian besar media daring di Indonesia yang dinilai terlalu menerapkan praktik jurnalisme mulut dalam meliput kerusuhan.

Jurnalisme mulut menghasilkan banyak berita yang tidak memberikan informasi jernih perihal kerusuhan, yakni berita yang gemar menempatkan pernyataan satu narasumber sebagai agenda utama pemberitaan. Menurut Remotivi, verifikasi yang seharusnya dilakukan media atas setiap pernyataan tokoh, tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat, sehingga konten yang disajikan oleh media bersifat *update* dan sepotong-potong untuk menjawab rasa penasaran publik. Media juga dinilai oleh Remotivi bermain terlalu netral karena melayani suara dari seluruh kubu elit politik yang tidak berdasar dan membuat kondisi menjadi lebih tegang.

Pemberitaan Kompas.id dipilih sebagai objek penelitian ini, karena media tersebut adalah salah satu media mainstream berskala nasional yang turut memberitakan peristiwa kerusuhan pascapemilu 21-23 Mei tahun 2019.

Konten-konten milik media Kompas.id diterbitkan secara digital, baik diambil dari pemberitaan Harian Kompas atau diproduksi terpisah namun menggunakan gaya berita khas Harian Kompas. Dengan demikian, model pemberitaan di Kompas.id lebih serupa dengan konten media surat kabar ketimbang media *online*. Media Kompas.id terikat pula dengan visi Harian Kompas, yakni “menjadi institusi yang memberikan pencerahan bagi perkembangan masyarakat Indonesia yang demokratis dan bermartabat serta menjunjung tinggi asas nilai kemanusiaan.”

Penulis tertarik untuk menguji penerapan jurnalisme damai dalam pemberitaan media Kompas.id, karena media tersebut menyebut adanya “asas menjunjung tinggi nilai kemanusiaan” di dalam visinya. Penulis kemudian ingin menguji apakah klaim visi tersebut sejalan dengan gaya pemberitaan media Kompas.id dalam memberitakan konflik kerusuhan pascapemilu 2019. Menurut Nurudin (2006), kemanusiaan adalah nilai yang diterapkan di dalam praktik jurnalisme damai (Nurudin, 2006, pp. 09). Media diharuskan untuk memanusiakan pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik (McGoldrick & Lynch, 2006, p. 31).

Dalam perjalanan historisnya, tercatat pula bahwa Jakob Oetama dan PK Ojong merancang Harian Kompas sebagai surat kabar yang berlandaskan nilai humanisme yang mentoleransi kemajemukan di Indonesia (Kurniawan & Nurcahyo, 2013, p. 56). Di era orde terpimpin, Harian Kompas memposisikan diri sebagai surat kabar independen yang menghargai keberagaman, sebagai perwujudan dari pers Katolik (Kurniawan & Nurcahyo, 2013, p. 93). Dalam buku berjudul 'Kompas Menjadi Perkasa Karena Kata', dijelaskan bahwa Jakob Oetama menuntut para wartawannya agar bekerja dengan dilandasi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Sehingga, jurnalistik yang disajikan Harian Kompas harus mengutamakan dialog yang menunjukkan sikap saling menghargai (Sutamat, 2012, pp. 130-131).

Selain itu, karena terikat dengan nilai Harian Kompas, maka Kompas.id juga menerapkan rutinitas media yang ketat sebagaimana surat kabar. Proses pembentukan berita surat kabar umumnya mengutamakan kelengkapan dan kedalaman. Surat kabar juga mengharuskan pemberitaanya dibuat dengan metode pengumpulan data yang lengkap, mulai dari wawancara, observasi, partisipasi peristiwa, hingga riset dokumen, di tambah dengan disiplin konfirmasi dan verifikasi. Sirkulasinya pun berjalan dengan hati-hati, dimana pembuatan, penyuntingan, dan distribusi dilakukan secara bertahap (Eddyono, 2013, p. 52).

Rutinitas surat kabar seharusnya lebih mampu mengakomodir penerapan jurnalisme damai (Rusdi, 2012, p. 393). Maka, penulis hendak membuktikan apakah hal tersebut juga berlaku dalam kasus peliputan konflik oleh media Kompas.id, atau justru media tersebut tetap bisa terjebak dalam pendekatan jurnalisme perang meskipun sudah menerapkan rutinitas media yang ketat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah judul penelitian yang ditetapkan, penulis kemudian menetapkan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi jurnalisme damai dalam pemberitaan kerusuhan pascapemilu 21-23 Mei Tahun 2019 oleh media Kompas.id?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, peneliti kemudian menetapkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Apakah teks berita media Kompas.id tentang kerusuhan pascapemilu 21-23 Mei tahun 2019 berorientasi pada perdamaian?
- 2) Apakah teks berita media Kompas.id tentang kerusuhan pascapemilu 21-23 Mei tahun 2019 berorientasi pada masyarakat?
- 3) Apakah teks berita media Kompas.id tentang kerusuhan pascapemilu 21-23 Mei tahun 2019 berorientasi pada kebenaran?

- 4) Apakah teks berita media Kompas.id tentang kerusuhan pascapemilu 21-23 Mei tahun 2019 berorientasi pada resolusi?
- 5) Apakah rutinitas media Kompas.id mampu mengakomodir penerapan jurnalisme damai dalam memberitakan kerusuhan pascapemilu 21-23 Mei tahun 2019?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah disusun, penulis menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui orientasi perdamaian pada teks berita media Kompas.id tentang kerusuhan pascapemilu 21-23 Mei tahun 2019.
- 2) Untuk mengetahui orientasi masyarakat pada teks berita media Kompas.id tentang kerusuhan pascapemilu 21-23 Mei tahun 2019.
- 3) Untuk mengetahui orientasi kebenaran pada teks berita media Kompas.id tentang kerusuhan pascapemilu 21-23 Mei tahun 2019.
- 4) Untuk mengetahui orientasi resolusi pada teks berita media Kompas.id tentang kerusuhan pascapemilu 21-23 Mei tahun 2019.
- 6) Untuk mengetahui kemampuan rutinitas media Kompas.id dalam mengakomodir penerapan jurnalisme damai dalam memberitakan kerusuhan pascapemilu 21-23 Mei 2019.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi contoh yang baik dan relevan tentang penerapan metode kombinasi (*mix method*) dalam penelitian analisis perilaku media ketika meliput peristiwa konflik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membuktikan secara ilmiah keterkaitan antara kualitas isi pemberitaan konflik dengan kondisi rutinitas yang berlaku di internal media.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan alternatif bagi organisasi media atau pekerja media yang hendak melakukan evaluasi atau perbaikan atas kinerja dalam memproduksi pemberitaan peristiwa konflik.

1.5.3. Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi masyarakat umum dan individu akademik yang hendak mengenal dan mempelajari pendekatan jurnalisme damai dalam kaitannya dengan perilaku kerja media daring. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi semua pihak yang hendak melakukan penilaian secara personal tentang perilaku media dalam meliput konflik.

1.6. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam aspek metodologi, yakni lebih spesifik pada kesesuaian antara alat ukur yang digunakan dengan objek ukur penelitian. Dalam metode analisis isi pendekatan kuantitatif, penulis mengembangkan indikator dari 4 kategori di dalam model jurnalisme damai secara mandiri. Untuk menekan dampak keterbatasan tersebut, penulis lantas membandingkan dan mengelaborasi operasionalisasi jurnalisme damai dari beragam penelitian terdahulu, baik milik UMN maupun perguruan tinggi lain, untuk menjamin keabsahan dari instrumen penelitian yang penulis gunakan.

Selain itu, penelitian ini juga sedikit membuka ruang bagi subjektivitas penulis dalam mengidentifikasi keterkaitan antara data analisis isi kuantitatif dengan wawancara kualitatif. Sebab, penelitian terdahulu yang membahas dampak tekanan rutinitas media terhadap kualitas jurnalisme damai tidak cukup banyak tersedia, sehingga referensi penulis juga terbatas.